

REPRESENTASI KEKUASAAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM PIDATO POLITIK PERINGATAN HUT KE-50 PDI-P

Frista Nanda Pratiwi¹, Anis Rahmawati²

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ² Badan Riset dan Inovasi Nasional
fristanandapратиwi@gmail.com¹; anis.rahmawati@brin.go.id²

ABSTRAK

Keberadaan partai politik (parpol) di Indonesia memegang peranan penting dalam mekanisme berjalannya sistem demokrasi. Salah satu parpol yang berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri merupakan figur politisi yang memiliki pengaruh besar dalam kancah politik nasional. Ia menjadi Ketua Umum PDI-P sejak tahun 1999 hingga sekarang. Setiap kali kongres digelar, Mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut selalu terpilih menjadi ketua umum partai. Sebagai ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri kerap menyampaikan gagasan politiknya kepada anggota partai dan khalayak ramai, salah satunya adalah melalui pidato politik. Pidato politik menjadi variabel penting dalam kelembagaan parpol, selain pengaruh dinamika internal. Dalam hal ini, pidato politik dapat menentukan citra atau penjenamaan parpol yang akan berpengaruh positif pada penguatan basis konstituen dan penerimaan masyarakat atau pemilih. Apabila diamati dari sudut pandang kebahasaan dan politik, pidato politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri merepresentasikan kekuasaan dan ideologi tertentu. Bahasa yang membangun wacana pidato politik menjadi sebuah alat untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai pemimpin kuat PDI-P. Potensi bahasa dan simbol kekuasaan seolah telah dipahami dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut. Kekuasaan dan pengaruh kuat Megawati Soekarnoputri saat ini dapat diamati melalui pidato politik yang disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P. Pidato politik Megawati tersebut mempunyai dampak yang signifikan bagi PDI-P karena disampaikan menjelang tahun politik 2024. Dalam pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai disebut memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2024. Berdasarkan atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidato politik Megawati Soekarno Putri dalam peringatan HUT ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Januari 2023 dengan kerangka analisis wacana kritis Fairclough. Analisis tersebut akan menggambarkan koneksi tersembunyi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Tahapan analisis terdiri atas deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Tahap deskriptif analisis meliputi identifikasi dan deskripsi unsur-unsur tertentu dari kosakata, tata bahasa, dan struktur teks yang berfungsi secara ideologis dalam wacana. Adapun tahap interpretasi berfokus pada proses pemroduksian teks. Misalnya, bagaimana teks diproduksi oleh pemimpin politik yang berinteraksi dengan rakyatnya. Sementara itu, tahapan eksplanasi berkaitan dengan bagaimana wacana dilihat dari tingkat kelembagaan (pemerintah) dan masyarakat yang biasanya berkaitan dengan partai politik dan kekuasaan pemerintah, pemimpin dan publik, dan sebagainya. Berdasarkan hasil analisis terhadap pidato tersebut, dapat disimpulkan bahwa Megawati Soekarnoputri membangun dan merepresentasikan kekuasaannya salah satunya melalui struktur teks yang berupa kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Melalui wacana yang dibangun dalam pidatonya, Megawati menyampaikan keberadaannya yang sangat penting dalam dinamika PDI-P dan pemerintah. Selain itu, "kekuatan" Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan partai politik juga diwujudkan melalui pronomina, bentuk kalimat, dan koherensi.

Kata kunci: pidato politik, kekuasaan, analisis wacana kritis

ABSTRACT

The existence of political parties in Indonesia plays an important role in the running mechanism of the democratic system. One of the influential political parties in Indonesia's governance is the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), led by Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri is a political figure who greatly influences the national political scene. She has been the Chairman of PDI-P since 1999 until now. Whenever a congress is held, the former 5th President of the Republic of Indonesia is always elected as the party's chairperson. As the chairperson of PDI-P, Megawati Soekarnoputri often conveys her political ideas to party members and the public, one of which is through political speeches. Political speeches become an important variable in political party institutions, in addition to the influence of internal dynamics. In this case, political speeches can determine the image or branding of political parties, which will positively strengthen the constituent base and public or voter acceptance. When observed from a linguistic and political point of view, the political speech delivered by Megawati Soekarnoputri represents power and certain ideologies. The language that builds the discourse of political speeches becomes a tool to legitimize her capacity as a strong leader of PDI-P. The potential of language and symbols of power has been understood and used to maintain her strength. Megawati Soekarnoputri's power and influence can be observed through the political speech at PDI-P's 50th Anniversary commemoration. Megawati's political discourse significantly impacted PDI-P because it was delivered ahead of the 2024 political year. In her political speech, Megawati Soekarnoputri, as the party chairperson, is said to have the prerogative to determine the presidential candidate that PDI-P will carry in the 2024 General Election of the Republic of Indonesia. Based on

this, this research aims to analyze Megawati Soekarno Putri's political speech during the commemoration of PDI-P's 50th anniversary at the Jakarta International Expo Kemayoran, Central Jakarta, on Tuesday, January 10, 2023, using Fairclough's critical discourse analysis framework. The analysis will illustrate the hidden connections between language, power, and ideology. The stages of research consist of description, interpretation, and explication. The analysis's descriptive step includes identifying and characterizing certain elements of vocabulary, grammar, and text structure that function ideologically in the discourse. The interpretation stage focuses on the process of text production. For example, how texts are produced by political leaders who interact with their people. Meanwhile, the explication stage relates to how discourse is seen from the institutional (government) and societal levels, which usually relates to political parties and government power, leaders and the public, and so on. Based on the speech analysis, it can be concluded that Megawati Soekarnoputri builds and represents her power through text structure in the form of vocabulary, grammar, and text structure. Megawati conveyed her very important existence in the dynamics of PDI-P and the government through the discourse built in her speech. In addition, Megawati Soekarno Putri's "power" as the leader of a political party is also realized through pronominal, sentence form, and coherence.

Keywords: *political speech, power, critical discourse analysis*

PENDAHULUAN

Komunikasi politik hakikatnya memiliki fungsi utama sebagai strategi untuk mengendalikan daya pikir masyarakat terhadap suatu masalah dengan cara yang menguntungkan bagi pembuat dan pengirim pesan politik (Lilleker 2006) sehingga berefek pada penerimaan masyarakat terhadap pesan politik dan pengirim pesan itu sendiri (McNair 2003). Melalui berbagai bentuk seperti laporan berita, wawancara, dialog interaktif, atau forum debat langsung, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kemampuan dan kebijakan secara terbuka. Konsep tersebut membuat para penggerak organisasi politik berusaha memainkan dan mengontrol prinsip-prinsip yang diyakini oleh publik. Premis umum tentang komunikasi politik adalah bahwa signifikansi efek yang ditimbulkan dari komunikasi politik tergantung pada konteks pesan yang disampaikan, terutama pada lingkungan politik tertentu. Hal tersebut membuat pengirim pesan politik harus mengupayakan strategi demi keberhasilan tujuan komunikasi politik tersebut (Sulaiman 2013).

Dalam sebuah negara demokrasi, komunikasi politik menjadi senjata ulung bagi tokoh politik dengan masyarakatnya. Komunikasi antara lembaga yang memiliki kekuasaan dan rakyat yang dikuasai merupakan ihwal penting dalam sebuah sistem politik (Lilleker 2006). Van Aelst et al. (2017) menyebutkan bahwa mekanisme komunikasi politik dalam negara demokrasi adalah bahwa semakin banyak informasi politik yang disampaikan secara luas, semakin tinggi kemungkinan masyarakat akan terpapar dan kemudian mempelajari informasi politik tersebut. Proposisi tersebut membuat partai politik dalam negara demokrasi berupaya mendongkrak “suara” melalui komunikasi politik. Pembangunan citra melalui komunikasi politik sangatlah penting karena partai politik dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut tidak terlepas dari kapabilitas aktor politik dalam membentuk opini publik dan menarik simpatik, baik massa pendukung maupun masyarakat umum (Azhar 2017).

Di negara demokrasi yang besar seperti Indonesia, partai politik telah lihai memainkan strategi komunikasi politik yang nyaris sama. Itu dilakukan melalui mesin politik partai. Hanya saja, jenis konstituen menyebabkan perbedaan jenis metode yang dipilih untuk melakukan pencitraan partai politik tersebut (Rosidi 2017). Jika diamati, mesin penggerak komunikasi politik partai politik salah satunya adalah retorika dari ketua partai politik itu sendiri. Retorika yang dibangun melalui bahasa akan mempengaruhi kekuatan dampak yang ditimbulkan. Aspek penggunaan bahasa—yang baik dan benar—dan pengetahuan substansi objek merupakan ihwal mutlak yang menentukan keberhasilan sebuah retorika (Keraf 2007). Oleh karena hal tersebut, para ketua parpol—sebagai mesin penggerak—akan mengupayakan retorika yang bernas untuk menciptakan otoritas, baik terhadap massa pendukung maupun masyarakat luas.

Salah satu ketua partai politik yang acap meramaikan diskusi publik dalam retorikanya adalah Megawati Soekarnoputri, ketua Partai PDI-P yang telah memiliki pengalaman memimpin partai sejak tahun 1999. Beberapa kekhasan retorika Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali ditunjukkan oleh penggunaan pilihan kata, gaya mulia dan bertenaga, struktur kalimat, bahasa kias, dan penggunaan humor (Kusno 2015). Karakteristik retorika tersebut bertujuan untuk menarik perhatian massa pendukung, memahami pendengar terhadap substansi pidato, memberikan sugesti, menggelorakan semangat, dan sebagainya.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah pidato politik Megawati Soekarnoputri dalam acara peringatan HUT ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo

Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Januari 2023 dengan kerangka analisis wacana kritis Fairclough yang memandang teks dari tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis sosial-budaya (Zaman 2022). Popularitas Megawati Soekarnoputri sejak pemilihan umum tahun 1999 menjadikan rekam jejaknya patut diperhitungkan. Megawati muncul sebagai tokoh oposisi pada tahun 1980-an dan 1990-an melalui serangkaian manuver politik yang cukup kontroversial dalam konteks sejarah rezim Soeharto (Zip 2001). Sementara itu, dalam konteks sekarang, Megawati—masih tetap—hadir sebagai ketua PDI-P, partai yang berpengaruh kuat pada berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Kekuatan dan kekuasaan Megawati tersebut dicerminkan melalui agenda-agenda politik PDI-P, salah satunya pada saat menyampaikan pidato politik.

KERANGKA TEORI

Analisis wacana kritis telah digagas sejak tahun 1980-an. Peneroka pendekatan tersebut antara lain adalah Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun van Dijk, dan sebagainya. Sejak saat itu, analisis wacana kritis menjadi cabang analisis wacana yang berpengaruh dan berkembang pesat (Blommaert and Bulcaen 2000). Pendekatan analisis wacana kritis bertujuan untuk membongkar ideologi di balik sebuah teks dengan menggunakan analisis interpretasi dan eksplanasi, melibatkan konteks situasi, dan memperhitungkan entitas budaya secara komprehensif dan global (Fairclough 2003). Konsep pendekatan analisis wacana kritis dipahami sebagai alat untuk mengungkap hubungan antara dominasi, diskriminasi, kekuasaan, dan kontrol dalam majud bahasa. Lebih lanjut, konsep analisis wacana kritis dapat mengungkap contoh realitas interaksi sosial yang memanfaatkan bentuk linguistik. Secara spesifik, pendekatan analisis wacana kritis memiliki ciri khas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat serta hubungan antara analisis dan praktik yang dianalisis.

Dalam konsep analisis wacana kritis, wacana dipandang sebagai wujud representasi objek kekuasaan yang samar-samar. Kedalaman analisis wacana kritis akan membuat hal tersebut menjadi lebih terlihat dan transparan (Blommaert and Bulcaen 2000). Analisis wacana kritis menawarkan pemahaman bahwa semiosis dibangun oleh elemen-elemen proses sosial, seperti hubungan sosial, kekuasaan, institusi, dan nilai-nilai budaya. Untuk itu, pendekatan analisis wacana kritis berupaya mengungkap hubungan antarelemen tersebut: semiosis dan praktik-praktik sosial. Secara detail, Fairclough menggambarkan tingkatan tatanan wacana yang merupakan dimensi semiosis dan praktik sosial, yaitu genre (cara bertindak), wacana (cara merepresentasikan), dan gaya (cara menjadi) yang dimanifestasikan di dalam teks (Ren 2023).

Seperti kebanyakan investigasi CDA, kita perlu mempertimbangkan konteks langsung dan konteks yang lebih luas yang mendefinisikan teks. Hal ini mencakup teks pendamping, konteks situasional, serta konteks sosio-budaya dan historis, karena fitur-fitur seperti itu, "terutama yang berkaitan dengan peran, lokasi, dan waktu yang ditentukan secara sosial, sangat penting dalam pendefinisian wacana politik" (Chilton dan Schäffner, 2002:16). Kutipan tersebut diambil dari pidato 32 menit² yang disampaikan pada tanggal 7 Maret 2015 untuk mengenang salah satu momen penting dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat: ketika sekitar 600 orang peserta aksi yang berusaha meninggalkan Selma dalam perjalanan menuju Gedung Kongres Negara Bagian Alabama di Montgomery untuk menuntut persamaan hak pilih bagi warga Amerika keturunan Afrika, diserang di sebuah jembatan oleh polisi negara bagian dan polisi setempat dengan pentungan dan gas air mata. Lokasi yang dipilih Obama untuk pidatonya, Jembatan Edmund Pettus di Selma, dan waktunya, yaitu peringatan 50 tahun salah satu peristiwa penting dalam gerakan hak-hak sipil, sangat penting dalam mendefinisikan konteks langsung dan lebih luas. Selain itu, sebagai bagian dari konteks sejarah yang lebih luas, kita perlu memahami bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut memicu protes lebih lanjut, yang memuncak pada tanggal 25 Maret 1965 dalam pawai terakhir sekitar 25.000 pengunjuk rasa, yang dipimpin oleh Martin Luther King, menuju gedung Kongres. Peristiwa-peristiwa di sekitar Selma berujung pada pengesahan Voting Rights Act of 1965, yang melarang praktik-praktik yang tidak adil dalam registrasi pemilih, sebagaimana dicatat oleh Combs (2013: 6), peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Maret 1965 merupakan momen penting bagi gerakan hak-hak sipil di Amerika.

Kutipan di atas dapat menjadi titik awal untuk diskusi tentang bahasa dan politik. Pertama-tama, kutipan tersebut menggambarkan isu-isu yang dirangkul oleh CDA ketika menyelidiki political discourse (PD), yaitu "dimensi semiotik dari kekuasaan, ketidakadilan, pelecehan, dan perubahan ekonomi-politik atau budaya dalam masyarakat" (Fairclough, Mulderigg, dan Wodak, 2011: 357) Dimensi kekuasaan jelas tercermin dalam peran dominan pembicara, yaitu presiden Amerika Serikat. Namun, pembicara yang sama, sebagai perwakilan dari minoritas kulit hitam yang secara historis tertindas dan

dikucilkan, tampaknya juga menjadi korban dari sistem kekuasaan dan dominasi wacana yang melanggengkan ketidakadilan dan pelecehan terhadap kelompok minoritas Kutipan tersebut (dan keseluruhan pidato) berfokus pada perubahan politik dan budaya di kalangan orang Afrika-Amerika dalam masyarakat AS selama 50 tahun terakhir, sehingga pidato tersebut dapat dilihat sebagai contoh praktik wacana yang bertujuan untuk mengubah lebih jauh praktik-praktik sosial. Sekilas, kutipan tersebut mungkin tampak agak berbeda dari kebanyakan investigasi yang terinspirasi oleh CDA, karena pembicara tidak memproduksi atau mereproduksi ketidaksetaraan sosial, melainkan memuji kebaikan gerakan hak-hak sipil dan transformasi kelompok minoritas yang tadinya didominasi menjadi kelompok dominan. Namun, teks ini tidak kalah penting untuk tujuan kita, menjadi contoh dari apa yang van Dijk (1997: 11) sebut sebagai "perlawanan dan kekuatan tandingan terhadap bentuk-bentuk dominasi wacana semacam itu." Kita tidak dapat melupakan bahwa Obama mengeksploitasi posisinya yang menonjol dan berkuasa untuk menyebarkan persepsi tentang perubahan status quo di kalangan orang Afrika-Amerika, kita juga dapat berargumen bahwa Obama membentuk kembali praktik sosial melalui praktik wacana, dan, secara khusus, genre pidato peringatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough. Konsep utama analisis wacana kritis adalah untuk mengungkap asumsi ideologis dalam sebuah wacana. Bahasa dimaknai sebagai praktik sosial, menjadi instrumen yang kuat bagi individu atau kelompok untuk memproduksi makna tertentu, mengontrol pemikiran khalayak, mempromosikan cita-cita sosial tertentu, dan menyembunyikan sesuatu hal untuk kepentingan individu/kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Tekstual

Pada tataran tekstual, pidato Megawati Soekarnoputri mencakup pembahasan representasi, relasi, dan identitas.

(1) Representasi

Dalam pembahasan representasi, bahasa kekuasaan yang digunakan oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya dapat diidentifikasi melalui kosakata dan pilihan kata, repetisi, pronomina, dan kalimat imperatif digunakan.

Diam. Jadi, sebelum Ibu bacakan pidato penting karena ini hari yang bersejarah. Nah, Ibu mau ... tadi sudah diumumkan bahwa ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi. Saya bilang sama Pak Jokowi, lah halah, kok nyusahkan saya, toh, Pak. Jadi, selain sebagai ketua umum partai, Ibu ditugasi dua badan. Yang pertama ini menurut Ibu sangat penting sekali bagi kita warga PDI Perjuangan di mana pun dia berada, yaitu apa Ibu dijadikan sebagai Ketua Dewan Pembina ideologi Pancasila. (tepu tangan)

Pada saat membuka pidatonya, Megawati mengucapkan kata *diam* yang dilanjutkan dengan menyampaikan tujuannya berbicara di depan pendukungnya. Alih-alih membuka pidato dengan sapaan, Megawati justru memilih kata *diam* yang artinya beliau ingin semua yang hadir mendengarkannya. Megawati juga selalu menggunakan pronomina *ibu* yang merepresentasikan kedudukannya sebagai sosok tertinggi di dalam sebuah kelompok. Temuan tersebut didukung dengan kalimat "Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan partai di manapun mereka berada." Pemilihan kata *anak* membuat pendengar yang merupakan massa pendukungnya berada di dalam hubungan ibu dan anak, yang berarti di dalam konteks sosial, anak harus menurut kepada ibunya. Pidato dilanjutkan dengan kalimat *tadi sudah diumumkan bahwa ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi*. Melalui klausa *tadi sudah diumumkan*, Megawati sebenarnya melakukan repetisi atas informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Repetisi tersebut tentu tujuannya untuk menekankan kembali posisinya sebagai pemimpin PDI Perjuangan dan Ketua BPIP. Pemilihan kata dan klausa tersebut dapat dikatakan berhasil karena direspons dengan tepuk tangan oleh peserta yang hadir.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang denger apa tidak, ya? (Denger) Tidak? Denger? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh)"

Setelah mengajak hadirin mengucapkan salam Pancasila, Megawati kemudian membuka sambutannya dengan ucapan salam hingga dua kali. Selain itu, Megawati juga mengulang pertanyaan *denger apa tidak*,

ya? dan tidak? dengar?. Kridalaksana (1993) menyebutkan bahwa repetisi atau pengulangan unsur bahasa beberapa kali berturut-turut merupakan pemanfaatan stilistika untuk tujuan ekspresif. Itu dapat dipahami sebagai upaya Megawati untuk menunjukkan kekuasaannya dalam berbicara di depan massa pendukungnya. Apa yang dilakukan Megawati—repetisi—cukup berhasil karena hadirin memberikan respons positif dengan bertepuk tangan dan menjawab salam dengan cukup lantang.

Dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri, penggunaan pronomina persona mempertegas status dan kedudukannya selaku pembicara atau penutur di hadapan pendengar atau mitra tuturnya dalam forum Peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan Dalam forum tersebut, ia tidak hanya menggunakan kata saya sebagai kata ganti untuk menyebut dirinya, tetapi ia juga menggunakan kata aku. Berikut adalah contoh pronomina saya dan aku yang digunakan oleh Megawati Soekarnoputri.

“Saya bilang ma Bapak saya. Bapak aja ma penjajah boleh sekolah sampai dapat gelar insinyur loh. Ini republik apa aku bilang.

Terus saya bilang gini kan Pak Jokowi saya bilang Pak Jokowi Pak entar kalau ini saya minta izin untuk pendamping bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang bapak Ma'ruf kan terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menkopolkam. Terus saya bilang nama mereka kok enak amat ya aku tadinya bosnya mereka. Eh tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung, tung, tung, tung, tung. Ko kora dijupuk, ya? Lha kan mestine ya katut no aku. Enggap, tetep aja BPIP. Ya, ya udah, karena saya enggak cari kuasa tahu nggak? Hem.”

Pronomina persona pertama saya dan aku sama-sama digunakan sebagai kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara. Namun, kata saya dan aku memiliki perbedaan ragam bahasa. Kata saya termasuk ke dalam ragam bahasa resmi atau formal, sedangkan kata aku termasuk ke dalam ragam bahasa takresmi atau nonformal. Megawati Soekarnoputri menggunakan kata saya secara umum untuk menyebut dirinya dalam forum tersebut. Namun, apabila ditelisik lebih lanjut, penggunaan kata saya secara khusus digunakan untuk membahaskan dirinya kepada orang yang ia hormati, misalnya ayahnya, yaitu Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Akan tetapi, ketika bercerita tentang pengalaman pribadinya atau menjelaskan pendapat atau komentarnya terhadap peristiwa tertentu kepada mitra tutur yang merupakan anggota partainya maupun anggota forum secara umum, ia sesekali menggunakan kata ganti aku untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai. Dalam forum resmi yang dihadiri oleh para pejabat negara, petinggi partai, dan anggota PDI Perjuangan, penggunaan kata aku sebagai pronomina persona menunjukkan bahwa penutur merupakan sosok yang berpengaruh dan memiliki kedudukan yang tinggi sehingga tidak merasa perlu menjaga keformalan dalam bertutur sebagai bentuk keseganan.

Selanjutnya, dalam menyebut dirinya, Megawati juga menggunakan nomina *ibu* sebagai pengganti pronomina persona pertama *saya* atau *aku*. Nomina *ibu* tersebut merupakan nomina pengacu yang menunjuk kepada Megawati selaku penutur atau dirinya sendiri. Menurut (Molieono, A. M. 2017) pada umumnya nomina penyapa dan pengacu berkaitan dengan istilah kekerabatan, seperti *bapak, ibu, kakak, adik, dan saudara*, serta nama jabatan dan pangkat, seperti *lurah, profesor, dokter, dan kapten*. Nomina penyapa dan pengacu digunakan karena dalam budaya bangsa Indonesia yang memperhatikan tata krama dalam pergaulan, orang seringkali segan menggunakan pronomina persona tertentu, misalnya pronomina kedua kamu, engkau, atau Anda yang dirasa kurang hormat jika dibandingkan dengan istilah kekerabatan serta nama jabatan dan pangkat. Selain itu, dalam sebuah tuturan istilah kekerabatan serta nama jabatan dan pangkat dapat menjadi bentuk honorifik. Bentuk honorifik merupakan bentuk lingual yang dipakai untuk menyatakan penghormatan yang dalam bahasa tertentu dan dipakai untuk menyapa orang lain (Kridalaksana 2009).

Nomina *ibu* yang digunakan Megawati untuk mengacu pada diri sendiri menunjukkan bentuk penghormatan. Dalam hal ini, ia berusaha merepresentasikan dirinya sebagai sosok yang dihormati dan disegani oleh anggota forum yang mendengarkan pidatonya. Selain itu, penggunaan kata *ibu* juga dapat dipahami sebagai upaya penutur untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai ketua umum partai seperti pada kutipan berikut.

“Jadi, ibumu siapa, dong? Ibumu siapa? Hayo, jawab sendiri ibukmu siapa? Akeh sing meneng timbang sing teriak. Satu suara. Ibumu siapa? (Bu Mega!) Ya, ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Mau bilang apa lagi? Sekali lagi tidak menjalankan instruksi Partai, untuk apa Ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum? Kalian paling ngeliat, huh, ibu paling nggak tahu. No, Ibu tahu lo. Ibu tahu lo. Sekarang ibu kan lagi bikin, udah bikin, udah turun loh. Itu diketuai sama Mas Prananda. Jadi, ada tempat pemantauan. Absensi mesti jalan. Coba bayangkan apa yang ibu instruksikan harus dijalankan. Lho instruksi ibu itu sebetulnya nggak susah loh dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi nggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif?”

Pada kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Megawati selaku ketua umum partai menggunakan kata ibu untuk menekankan kedudukan dan kekuasaannya sebagai Ketua Umum PDI-P. Lebih lanjut, ia juga sebanyak empat kali mengulang pertanyaan “ibumu siapa?” untuk memastikan bahwa anggota partainya masih mengakuinya sebagai ketua umum partai. Selain itu, nomina pengacu ibu juga ia gunakan untuk menjelaskan kepada para anggota partainya bahwa setiap anggota partai harus mengikuti instruksi partai untuk “turun ke bawah” atau mengunjungi masyarakat secara langsung dan ia selaku ketua umum partai sudah membuat sistem pemantauan bagi para anggota partai sebagai langkah untuk memastikan kinerja para kadernya.

Dalam pidato politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDI-P, kalimat imperatif menjadi salah satu bentuk representasi kekuasaan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P. Kalimat imperatif digunakan oleh Megawati untuk memberikan pengaruh kepada para pendengarnya untuk melakukan sesuatu yang ia perintahkan. Berikut adalah penggunaan kalimat imperatif yang ditemukan pada pidato politik Megawati Soekarnoputri. Sebagai ketua umum partai politik, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi atau perintah kepada anggota partainya agar mereka dapat memenuhi harapan atau ekspektasi rakyat. Berikut contoh penggunaan kalimat imperatif yang digunakan oleh Megawati untuk memengaruhi para kadernya.

“Iya kalian tuh musti ingat, loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian! Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh, saya pikir aduh, ilah, huh, kok gini, to. Loh, sekarang setelah merdeka, saya melihat semangat semua makin turun, makin turun, makin turun, hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan.”

(2) Relasi

Relasi yang menjadi pembahasan dalam konteks pidato politik Megawati adalah relasi antara Megawati selaku produsen wacana dengan pendengarnya. Dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-50 PDI-P, pidato politik ketua umum partai menjadi hal yang berpengaruh, bukan hanya bagi institusi partai dan para kadernya, melainkan juga bagi para pemimpin negara, wartawan, hingga masyarakat pada umumnya. Dalam konteks penyampaian pidato politik saat itu, Megawati selaku penutur memiliki relasi atau hubungan yang kuat dengan para pendengar atau mitra tuturnya. Pada forum tersebut, hadir kalangan masyarakat tertentu selaku pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sosok Megawati dan institusi partai yang dipimpinya. Mereka adalah petinggi dan kader PDI-P yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan para pejabat negara yang berasal dari PDI-P maupun dari kalangan nonpartai. Para petinggi dari partai berlambang kepala banteng yang hadir dalam forum tersebut di antaranya Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, hingga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Selain petinggi partai dan para kader PDI-P yang mempunyai hubungan hierarkis secara langsung dengan Megawati selaku pemimpinnya, para pejabat negara juga hadir dalam perayaan HUT ke-50 PDI-P. Pejabat negara yang hadir dan mendengarkan pidato politik Megawati tersebut di antaranya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, dan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Para menteri yang hadir bukan hanya kader PDI-P, melainkan juga menteri yang berstatus nonpartai. Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud M.D., Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri ATR/Kepala BPN, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN, Budi Gunawan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Sementara itu, para pejabat yang berasal dari PDI-P dan hadir di acara ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkumham Yasonna Laoly, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Menteri PPA, Bintang Puspayoga, Kepala LKPP Hendar Prihadi, hingga Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam acara tersebut, tidak ada satu pun petinggi dari partai lain yang hadir. Megawati sengaja tidak mengundang partai lain karena peringatan tersebut digelar sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka kemenangan pemilihan umum. Oleh karena itu, sifat forum tersebut lebih mengarah kepada perayaan internal guna memperkuat jati diri PDI-P sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Meskipun tidak dihadiri oleh petinggi partai lain, kehadiran para pejabat negara bahkan pejabat nonpartai dalam forum perayaan HUT ke-50 PDI-P menunjukkan hubungan politik yang kuat antara Megawati dan institusi PDI-P dengan mereka. Kehadiran para pejabat negara menunjukkan bahwa Megawati dan partai yang dipimpinya memiliki kekuasaan dan kedudukan yang signifikan di Indonesia sehingga dihormati oleh para pejabat negara.

Selain itu, Megawati dan PDI-P memiliki hubungan politik yang strategis dengan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, PDI-P selaku partai yang dipimpinnya telah mengukung Presiden Joko Widodo selama dua periode, yaitu dalam pemilihan umum tahun 2014 bersama wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan pemilihan umum tahun 2019 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hubungan politik yang erat antara Megawati dan presiden Republik Indonesia menunjukkan bahwa Megawati merupakan sosok politisi yang tangguh sehingga disegani oleh para pejabat negara yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

(3) Identitas

Aspek identitas yang menjadi pembahasan dalam makalah ini berfokus kepada cara identitas Megawati selaku produsen wacana ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Hal itu berhubungan dengan bagaimana identitas dan latar belakang biologis dan sosial-politis Megawati yang melekat pada dirinya berpengaruh terhadap topik yang dibahas dalam pidato yang ia sampaikan. Dalam hal ini, Megawati selaku memiliki profil politik sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Ia merupakan presiden perempuan pertama dan satu-satunya yang pernah menjabat di Indonesia. Dalam kancah politik nasional, Megawati mengemban jabatan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan sejak tahun 1999 hingga sekarang. Hal itu membuktikan bahwa ia dipercaya untuk menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Identitas yang melekat pada Megawati tidak lepas dari latar belakang biologisnya sebagai anak dari proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sampai saat ini, ia menjadi satu-satunya keturunan Presiden Soekarno yang paling berhasil dalam merintis karier yang gemilang pada bidang politik. Ia juga menjadi seorang ibu dari Puan Maharani, seorang politisi PDI-P yang juga menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Identitas yang melekat pada diri Megawati berpengaruh terhadap wacana yang dikonstruksi dalam pidato politiknya. Dalam hal ini, identitas Megawati yang ditampilkan dalam pidatonya berhubungan dengan kedudukannya sebagai ketua umum partai, anak dari presiden pertama republik Indonesia, orang Jawa, dan perempuan sekaligus ibu. Adapun sifat yang berupaya ia tunjukkan dalam pidato tersebut adalah cantik, pintar, kharismatik, dan sosok pejuang seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“Kalau aku mau selfie, oh, pasti pengikutku okeh ‘banyak’. Kenapa? Satu, perempuan, dua cantik. He, baru dua aja udah ditepuhin. Tiga, kharismatik. (Tepuk tangan) Empat, apa, neh ‘lagi’? Pintar. (Tepuk tangan) Tahu-tahu, ketiban profesor aja, dua, doktor honoris causa sembilan. (Tepuk tangan) Masih nunggu neh ‘lagi’ lima karena pandemi. Aku dewe ‘sendiri’ sampai garuk-garuk kepala. Iki gara-gara apa, ta, ya. Terus, ini. Salah satu pengamat, apa iku namane ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak, sih, ibukmu ni udah pinter, cantik, kharismatik. (Tepuk tangan) Pejuang. Apa, neh ‘lagi’? (Tepuk tangan)”

Sebagai ketua umum partai, Megawati kerap menjelaskan kekuasaannya dengan menyebutkan peringatan, instruksi atau perintah, dan nasihat kepada para kadernya. Salah satu contoh instruksi yang disebutkan dalam pidato politiknya di antaranya instruksi bagi para kadernya untuk “turun ke bawah” atau *blusukan*, yaitu bertemu dan membangun ikatan (*bonding*) dengan masyarakat. Selain itu, Megawati juga menjelaskan bahwa turun ke bawah merupakan salah satu cara yang efektif untuk membesarkan dan menambah anggota partai.

“Nah, jadi, kalau ibu tuh bilang turun ke bawah tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya? (Mengerti) Kalian begini kita maunya membesarkan partai ini. Tentu, dong. Itu pasti umum keinginan semua partai. Itu, kan, menambah, apa, anggota.”

Dalam pidato politiknya, Megawati menjelaskan latar belakang terbentuknya PDI Perjuangan pada 10 Januari 1973. Ia menjaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan partai Nasional Indonesia PNI, Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba. Oleh karena itu, saat itu ia memilih untuk bergabung dengan PDI karena pengaruh latar belakang biologis dan sosialnya sebagai anak dari Soekarno selaku pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI.

“Bapak saya, tahu ndak Bapak saya siapa? (Tahu) Lho, kok nggak banyak yang tahu, ya. Lha kok lemes, ya. Siapa? (Bung Karno) Siapa? (Bung Karno) Yang keras, dong! (Bung Karno) Gitu, dong. Karena begini tadi saya bilang sudah fusi, kan. Jadi, ketika saya diminta, jadi saya mikir apa, ya, namanya PDI terus saya lihat, oh, di situ ada PNI, Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno pada tanggal 4 Juni 1927.”

Dengan menegaskan latar belakangnya sebagai anak Soekarno, Megawati dalam pidato politiknya berupaya menebarkan semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh ayahnya kepada para kader PDI-

P. Bagi Megawari, sosok Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut sangat menginspirasi dirinya dalam mengorganisasi rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Identitas Megawati selaku anak dari Soekarno yang melekat pada dirinya menentukan bagaimana ia mengonstruksi wacana dalam pidato politiknya untuk meraih atensi dan simpati dari para kadernya.

Megawati atau Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Ia merupakan anak kedua dari Presiden Soekarno. Ibunya, Fatmawati merupakan ibu negara pertama sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Megawati lahir setelah kemerdekaan Indonesia saat ayahnya menjadi presiden sehingga masa kecilnya banyak dihabiskan di Istana Presiden. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Perguruan Cikini, Jakarta.

Sebagai sosok yang lahir dan besar di pulau Jawa, dalam pidato politiknya, Megawati beberapa kali menunjukkan kepiawaiannya berbahasa Jawa. Bahasa Jawa ditunjukkan oleh Megawati dalam bentuk alih kode dan campur kode. Selain itu, Megawati juga sempat menyebutkan pengalamannya dalam “turun ke bawah”, tepatnya ke daerah Jawa Tengah. Menurutnya, kalau menemui rakyat di Jawa Tengah, kita harus pandai berbahasa Jawa, “Karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat,” ujarnya. Sebagai seorang yang pernah menjadi wakil rakyat, Megawati menceritakan pengalamannya dalam membangun ikatan dengan rakyat. Dalam hal ini, ia berupaya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat dan mendengarkan keluh-kesah mereka.

“Saya ngglosor. Kamu pernah ngglosor? Tahu ngglosor? Eh, selalu lemes, toh. Karena berarti banyak yang nggak pernah ngglosor. Ngglosor bahasa Jawa, tuh, duduk. Mending di tiker. Ya, saya ndeprook ‘duduk di tanah sembarang tempat’ aja. Ya, ngomong Jawa, lah.”

Dalam pidato politik yang disampaikan di hadapan ribuan kadernya, Megawati juga menunjukkan identitas dirinya sebagai sosok perempuan sekaligus ibu dan ia menginginkan para perempuan di Indonesia bisa maju dalam segala bidang, termasuk bidang politik. Sebagai ketua umum partai, ia ingin para kader yang bergender perempuan juga dapat mengambil peran dalam pemerintahan. Menurutnya, saat ini banyak perempuan yang cenderung mementingkan penampilan daripada pengetahuan. Sebagai seorang perempuan sekaligus ibu, Megawati membuktikan bahwa dirinya tidak menghabiskan waktunya untuk berdandan dan menonjolkan fisik. Ia bukan hanya berhasil berkiprah dalam bidang politik, melainkan juga berhasil mendidik anak dan cucunya.

“Saya dulu, ya, masak, loh, tapi anak saya, kan, keren-keren, tuh, ya. Cobain. Wah, ganteng-ganteng cantik-cantik. Itu ada dua cucu saya. Ayo, berdiri! Coba, nih, ayo, jangan malu, nih! Noh, ini putr-putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut (masuk politik)? Karena katanya mau tahu, ah, kalau masuk politik itu gimana nanti, boleh nggak?”

Sebagai seorang ibu sekaligus perempuan yang memiliki karier gemilang dalam bidang politik, Megawati berusaha membuktikan bahwa sebenarnya keberadaan perempuan memiliki peran yang penting. Ia menunjukkan banyak perempuan dalam catatan sejarah Republik Indonesia yang memiliki kontribusi yang luar biasa. Sebagai upaya untuk membuktikan hal itu, Megawati menyebutkan beberapa tokoh perempuan yang berpengaruh, seperti Ratu Sima, Ken Dedes, Gayatri, Rajapatmim Tribuwana Tungga Dewi, Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Hajjah Rasuna Said, Maryam Martha Tiahahu, hingga Supeni.

Dengan latar belakang politiknya sebagai ketua umum partai sekaligus mantan presiden pertama yang memiliki gender perempuan, Megawati juga berupaya untuk mendukung kesetaraan gender. Ia memaparkan bahwa semangat ulang tahun PDI-P ke-50, genggam tangan persatuan, berasal dari sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan bahwa Negara Indonesia dibangun untuk semua kalangan dan tidak membedakan suku, agama, dan gender. Bahkan, Megawati menyinggung bineka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di republik ini. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut.

“Bhinneka Tunggal Ika Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun empat puluh tujuh itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya.”

Dimensi Intertekstualitas

Megawati selaku ketua umum partai tentu sering menyampaikan pidato di hadapan publik. Teks pidato yang diproduksi oleh Megawati dalam perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan memiliki kesinambungan dengan pidato-pidato yang pernah ia sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Terkait pidato Megawati tersebut, Lidwina (2023) dalam mengkaji pidato-pidato Megawati dalam kurun waktu 2019–2023. Dalam artikel berjudul “Pidato Megawati 2019–2023: Apa Topik yang Dibahas dan yang Tak Disinggung?”,

topik utama yang sering diutarakan oleh Megawati adalah politik, yaitu lebih dari 50% dari keseluruhan durasi pidato yang disampaikan. Menurut Lidwina (2023), dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh Megawati, terdapat dua subtema yang sering dibahas, yaitu tentang sejarah PDI Perjuangan dan karier politiknya yang tidak bisa lepas dari pengaruh sosok Soekarno dan perintah-perintah Megawati yang diberikan kepada para kadernya.

Apabila teks pidato politik Megawati dalam rangka perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan dibandingkan dengan pidato politiknya pada saat perayaan HUT ke-49, secara umum wacana yang dikonstruksi dalam kedua teks tersebut berbeda. Apabila dalam teks pidato Megawati pada perayaan tahun 2022 Megawati lebih banyak membahas persoalan tentang penanganan Covid-19, dalam teks pidato yang disampaikan pada tahun 2023, persoalan penanganan Covid-19 tidak dibahas. Dalam pidato politik tahun 2023, Megawati lebih banyak membahas permasalahan politik dan menegaskan wewenangnya sebagai ketua umum partai.

Namun, terdapat persamaan dalam kedua pidato politik yang disampaikan oleh Megawati tersebut. Persamaan yang pertama adalah Megawati sama-sama menginstruksikan kadernya untuk turun ke bawah. Pada pidato politik tahun 2022, Megawati menginstruksikan para kader PDI Perjuangan untuk selalu melindungi dan membahagiakan rakyat sebagai kunci untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 2024.

“Caranya dengan melakukan kerja politik terbaik. Turun ke bawah merupakan jalan paling efektif untuk memenangkan Pemilu 2024.”

“Oleh sebab itu, instruksi saya selalu kepada seluruh tiga pilar dan seluruh mereka yang bersimpati ke PDIP, selalu turun ke bawah, menyapa, melindungi, dan membahagiakan rakyat. Tak ada yang lain. Hanya itu.”

(Pidato Politik Megawati Soekarnoputri dalam rangka HUT ke-49 PDI Perjuangan)

“Loh, instruksi ibu itu sebetulnya nggak susah, loh, dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi nggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif?”

“Nah, jadi, kalau ibu tuh bilang turun ke bawah tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya? (Mengerti) Kalian begini kita maunya membesarkan partai ini. Tentu, dong. Itu pasti umum keinginan semua partai. Itu, kan, menambah, apa, anggota.”

“Ibu bilang kerja! Turun ke bawah untuk menang menang, menang, gitu!”

(Pidato Politik Megawati Soekarnoputri dalam rangka HUT ke-50 PDI Perjuangan)

Selain persamaan tentang instruksi kepada para kader PDI Perjuangan untuk turun ke bawah, kedua pidato politik yang disampaikan oleh Megawati tersebut juga memiliki persamaan dalam hal cerita tentang sejarah PDI Perjuangan yang cikal-bakalnya adalah PNI yang didirikan oleh ayahnya, yaitu presiden yang pertama Republik Indonesia, Soekarno.

“Suatu semangat bagaikan api nan tak kunjung padam, suatu energi yang digerakkan oleh daya imajinasi dan cita-cita masa depan bangsa. Yang hingga saat ini terus terus terus kita perjuangkan sejarah perjuangan sangatlah panjang saya menyebutnya selalu adalah dari PDIP ke PDIP Perjuangan.”

“Tentu dimulai dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Bung Karno. Lahirnya PDIP pada tanggal 10 Januari 1973 karena dilakukan fusi dari 5 partai pada waktu itu hingga berbagai peristiwa politik yang oleh kehendak rakyat akhirnya melahirkan PDIP Perjuangan.”

(Pidato Politik Megawati Soekarnoputri dalam rangka HUT ke-49 PDI Perjuangan)

“Lima puluh tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan partai Nasional Indonesia PNI, Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba.”

“Karena begini tadi saya bilang sudah fusi, kan. Jadi, ketika saya diminta jadi saya mikir apa, ya, namanya PDI terus saya lihat, oh, di situ ada PNI Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi, itu harus harus apa tertanam di sini kalau kalian adalah PDIP Perjuangan.”

(Pidato Politik Megawati Soekarnoputri dalam rangka HUT ke-50 PDI Perjuangan)

Berdasarkan kedua pidato politik tersebut, dapat dipahami bahwa dalam dua tahun terakhir, Megawati masih menyebutkan sejarah PNI dan PDI Perjuangan yang idealisme dan keberadaannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosok Soekarno.

Praktik Wacana

Wacana pidato politik Megawati dianalisis dari sudut pandang produksi, distribusi, dan konsumsi sebuah teks. Sebuah teks diproduksi oleh seseorang dengan latar belakang dan tujuan tertentu. Dalam proses produksi, teks tidak bisa dipisahkan dari sosok produsen teks dan gagasan yang diusungnya. Dari sudut pandang produksi, teks pidato politik yang disampaikan dalam rangka perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2023 diproduksi oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan. Teks pidato politik yang disampaikan oleh Megawati mengusung tema “Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong-Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam” dengan subtema “Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya”. Pidato Megawati disampaikan dalam situasi formal karena forum tersebut dihadiri oleh para pejabat negara, petinggi partai, kader partai, hingga jurnalis. Kendati demikian, wacana pidato politik Megawati diproduksi dengan gaya bahasa yang cenderung santai. Pidato politik Megawati disampaikan di hadapan kurang-lebih 25 ribu orang yang hadir dalam perayaan ulang tahun partai yang digelar di Jakarta International Expo tersebut. Dalam menyampaikan pidato politiknya, Megawati selaku produsen wacana tampil dengan percaya diri. Megawati menyampaikan pidato politik dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-50 PDI-P dalam durasi hampir 2 jam dalam posisi duduk. Ia hanya berdiri pada awal pidatonya, yaitu saat ia menyapa para kadernya dan mengajarkan salam Pancasila.

Megawati menyampaikan pidato sesuai dengan kedudukannya sebagai ketua partai politik. Ia merupakan pemimpin pertama PDI Perjuangan sejak tahun 1998. Megawati merupakan sosok yang berhasil mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999. Hal itu ia lakukan agar partai tersebut dapat mengikuti pemilu. Nama PDI Perjuangan disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Pada kongres pertama yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan pada 27 Maret sampai dengan 1 April 2000 di otel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, Megawati terpilih sebagai Ketua DPP PDIP periode 2000–2005. Pada kongres berikutnya, Megawati kembali terpilih sebagai ketua umum hingga saat ini.

Selama dua dekade Megawati berhasil memimpin paratainya hingga menjadi partai terbesar di Indonesia. Sebanyak 128 orang atau 22,26% dari total kursi legislatif saat ini diduduki oleh kader PDI Perjuangan. Hingga saat ini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang dapat mencalonkan presiden dalam pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Dengan latar belakangnya sebagai ketua umum partai bertahan tersebut, Megawati menjadi “wajah” partai yang pidatonya menjadi wacana yang berpengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia.

Selanjutnya, dari sudut pandang distribusi atau penyebarannya, teks pidato politik Megawati disampaikan secara langsung atau tatap muka di hadapan para pendengarnya. Selain disampaikan secara langsung kepada para pejabat negara dan para kadernya, pidato politik Megawati juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal televisi dan YouTube berbagai media massa. Selain disiarkan secara langsung, pidato politik Megawati secara lengkap juga diunggah oleh berbagai media massa melalui kanal YouTube. Adapun media yang mendokumentasikan pidato tersebut secara langsung dan menyebarkan video lengkapnya melalui kanal YouTube di antaranya KOMPASTV, Kompas.com, Kumparan, TvOneNews, Tribunnews, METRO TV, MerdekaDotCom, Official iNews, CNN Indonesia, dan sebagainya. Selain oleh media massa, pidato politik Megawati juga disebarluaskan melalui kanal YouTube resmi PDI Perjuangan.

Selain disebarluaskan dalam bentuk video melalui media televisi dan YouTube, cuplikan pidato Megawati juga disebarluaskan oleh media massa dan para pemengaruh melalui media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Dalam bentuk tulisan, pidato Megawati juga disebarluaskan kepada masyarakat, baik oleh media massa cetak maupun elektronik. Bahkan, media kompas.id menuliskan transkripsi pidato Megawati tersebut.

Dari sudut pandang konsumsi teks, pidato politik Megawati dapat diakses dan dikonsumsi bukan hanya oleh pegiat media, melainkan juga oleh masyarakat luas. Teks pidato Megawati memiliki pengaruh atau efek tertentu di kalangan masyarakat. Hal itu karena dalam tataran konsumsi teks, masyarakat memiliki interpretasi yang bebas terhadap sebuah teks pidato. Selanjutnya, interpretasi atau pemaknaan masyarakat terhadap teks pidato tersebut menghasilkan respons berupa pemberitaan di media massa dan tanggapan warganet di kolom komentar media sosial.

Pada tahap selanjutnya, interpretasi dan pemberitaan pidato politik Megawati oleh media massa mendapatkan tidak lanjut dari petinggi PDI Perjuangan. Dalam hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta pada 19 Januari 2023. Tiga pimpinan PDIP yang hadir dalam konsultasi tersebut adalah Hasto Kristiyanto, Yasonna Laoly, dan Ahmad Basarah. Ketiganya diterima oleh Ketua Dewan Pers,

Ninik Rahayu, beserta anggota Dewan Pers lainnya. Mereka mempersoalkan pemberitaan yang dimuat oleh media Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Menurut mereka, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa berkelindan dan disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Menanggapi hal itu, Dewan Pers bersifat terbuka dan mempersilakan PDI Perjuangan untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan.

Praktik Sosial Budaya

Pendekatan analisis wacana kritis dapat juga mengungkap hubungan antara wacana dan konteks sosial budaya melalui kajian secara empiris. Praktik sosial budaya menurut Fairclough dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: level situasional (situasi pembangun wacana), institusional (pengaruh institusi) dan sosial (pengaruh sosial masyarakat). Itu dapat dilakukan dengan mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam konteks yang spesifik untuk menghasilkan interpretasi dengan mempertimbangkan efek kekuasaan tanpa menggeneralisasikan pada konteks lain (Silaswati 2019). Dalam pidato yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri, pemakaian bahasa tutur yang digunakan merupakan wujud hubungan dialektis antara peristiwa menjelang pemilihan umum 2024 dan kedudukan mutlaknyanya sebagai ketua partai PDI-P. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan pidato berikut.

“Kan saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan di calonkan.”

Wis, ora usah mikir. Urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu pokoknya nggak mungkin Ibu jeblosken kalian ke sumur kita kalau bekerja pasti menang.”

Dalam kutipan pidato tersebut, Megawati Soekarnoputri menunjukkan kekuasaan mutlaknyanya untuk menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024. Pengulangan substansi tuturan tersebut juga semakin memperkuat citra Megawati di depan massa pendukungnya. Fairclough (2003) menyebut fenomena tersebut sebagai hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, yang dalam konteks ini adalah Megawati sebagai ketua partai, pengurus/petinggi partai, Jokowi, dan massa pendukung PDI-P. Namun, idealisme dan ideologi Megawati tersebut tidak menyebabkan pertarungan kelas sosial dalam bentuk perlawanan ideologi seperti apa yang diungkap oleh Fairclough. Hal itu terjadi karena tuturan yang disampaikan Megawati seolah tidak memberikan “ruang” untuk para kader berbicara. Frasa hak prerogatif dan hak ketua umum sudah menutup dan mengunci celah tersebut. Sementara itu, di dalam kutipan berikutnya, muncul konteks lain sebagai berikut.

“Pak Jokowi iku ya ngono, loh. Mentang-mentang. Loh, iya. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasian, dah. (Tepuk tangan) Ho ooo. Loh, legal formal, loh. Beliau jadi presiden tuh, nggak ada kan ini. Legal formal kan. Diikuti terus sama saya. Aturannya aturan utamanya terus Pak Ma'ruf saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di di di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh saya lihat tuh mana dia tadi ya?”

Tuturan Megawati tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan—dan bahkan keberlangsungan—Jokowi sebagai presiden terpilih adalah karena PDI-P dan jasa Megawati. Dampak tuturan tersebut tentu adalah persepsi bahwa sebagai presiden, Jokowi tidak bisa lepas dari “campur tangan” Megawati yang juga berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Dalam konteks wacana, tuturan tersebut memunculkan konsep ketimpangan kekuasaan Megawati sebagai pimpinan PDI-P dan Jokowi sebagai presiden RI yang seharusnya berada pada puncak tertinggi kekuasaan dalam pemerintah. Kalimat berikutnya “Pak Ma'ruf saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di di di BPIP” juga menunjukkan dominasi kekuasaan Megawati yang dapat menentukan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden saat itu. Penjelasan Megawati bahkan secara eksplisit tersebut seolah memberikan peringatan untuk para kader PDI-P agar “manut” dengan Megawati jika ingin diusulkan, dicalonkan, atau diberi posisi pada Pemilu 2024.

Pada tataran institusional, dalam hal ini kondisi internal dan eksternal partai PDI-P, Megawati dipandang sebagai tokoh penting partai: pendiri PDI-P dan pemimpin jangka panjang, selain identitasnya sebagai putri presiden pertama Republik Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut menunjukkan bahwa perannya sebagai ketua partai sangat krusial dalam mencalonkan dan memastikan kemenangan Jokowi pada pemilu. Peran tersebut juga terus berpengaruh pada masa kampanye yang berhasil menaikkan posisi Jokowi sebagai calon presiden. Meskipun hal itu disorot dan dinilai negatif oleh masyarakat (Louise Ahlstrand 2021), Megawati tidak menampik dan menerima penilaian tersebut. Bahkan, saat dikaitkan dengan perannya sebagai “pemimpin abadi” PDI-P, hubungannya dengan politisi

lain (Prabowo Subianto), dan penunjukan putrinya, Puan Maharani, sebagai menteri saat itu, Megawati membiarkan penilaian tersebut tetap meluas di ruang publik. Megawati Soekarnoputri juga berupaya meyakinkan pendukungnya untuk mendapatkan kemenangan pada Pemilu 2024 dengan cara turun ke masyarakat secara langsung.

“Ayo angkat tangan siapa yang belum turun ke bawah? Kok akeh men sing ora angkat tangan. Berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah ada yang meneng. Ayo, ngapa kok belum turun. Lho katane mau tempur. Mau menang apa tidak? (Mau) Bohong.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa untuk memperoleh suara/kemenangan, para kader harus hadir di tengah masyarakat secara langsung. Untuk bertempur atau berperang, itulah senjata yang harus dilakukan. Strategi tersebut dinilai sebagai rumus kemenangan yang diyakini Megawati. Kenyataannya, itu memang dilakukan dan dinilai berhasil, minimal kemenangan yang diperoleh Jokowi dalam Pilpres atau Ganjar dan Risma dalam Pilkada. Proposisi tersebut juga diperkuat dengan pernyataan berikut.

“Sekarang kan saya taruh di DPP untuk semuanya itu tahu bahwa kalau kamu bekerja di PDI Perjuangan tidak perlu takut. Tidak perlu takut seperti tadi saya bilang harus disiplin, harga diri karena apa? Apa yang saya jalankan untuk kalian untuk bangsa dan negeri ini seperti tadi saya bilang saya sudah sumpah sama Bung Karno adalah Satyam Eva Jayate. Karena kebenaran lah yang akan menang. Eh, buktinya iyalah tapi kan mesti kerja. Kerja! Nggak mbokrok wae.”

Penilaian masyarakat terhadap Megawati Soekarnoputri tidak akan pernah melupakan sosoknya sebagai presiden perempuan pertama (dan satu-satunya hingga saat ini) di Indonesia. Kenyataan tersebut membuat Megawati tetap menjadi tokoh politik yang diperhitungkan dengan retorikanya yang terkadang “kontroversial”. Pidato Megawati yang “membawa-bawa” nama ayahnya, Soekarno, menjadi kekuatan sendiri untuk retorikanya. Hal tersebut menurut Coles (2018) menyebabkan kecurigaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pemimpin perempuan menjadi tidak ada. Dalam pidatonya, Megawati juga mengulik realitas sosial budaya yang berfokus pada perempuan sebagai berikut.

Melalui kalimat-kalimat pidatonya, Megawati dinilai juga menaruh perhatian pada pentingnya sosok perempuan di negeri ini. Retorika tersebut memang menjadi gaya Megawati yang juga pernah dikaji oleh Coles (2018) melalui kajian analisis wacana kritis. Perhatian dan perjuangannya terhadap perempuan mendapat penilaian positif di dalam kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Megawati telah mutlak sejak diklaim oleh Soekarno. Megawati tidak ingin dinilai bahwa ia beruntung hanya karena ia anak dari Soekarno, tetapi juga karena kedudukannya sebagai perempuan. Apa yang disampaikan Megawati tersebut mendorong para perempuan di Indonesia untuk menjadi pemimpin, berani berbicara, dan bahkan memiliki kekuasaan. Ia menyebutkan bahwa keberhasilannya memimpin dan membesarkan PDI-P perlu dilihat dan dicontoh oleh para perempuan.

Sementara itu, aspek lain dari pidato Megawati berkaitan manifestasi ideologi melalui retorika yang dibangun. Megawati, Soekarno, dan partai PDI-P merupakan satu kesatuan yang dapat dimaknai sebagai maujud ideologi marhaenisme. Marhaenisme tersebut mengacu pada praktik jati diri dari ide, narasi, dan laku politik Soekarno (Geraldly 2019). Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri menarasikan tumbuh kembang partai PDI-P dari titik bawah hingga menjadi partai besar. Keikutsertaan PDI-P dalam setiap pemilu mulai dari tahun 1999 hingga 2019 menjadikan PDI-P partai yang kuat dan besar sehingga memiliki kemudahan dalam membangun koalisi. PDI-P menjadi partai yang mapan dan kondisi tersebut secara eksplisit dipaparkan oleh Megawati melalui pidato politiknya. Apa yang disampaikan Megawati juga merepresentasikan posisi PDI-P sebagai partai nasionalis yang mengacu pada wacana politik kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Kekuasaan mutlak Megawati Soekarnoputri dimanifestasikan dalam bentuk bahasa pidato politik pada saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P. Pidato politik Megawati tersebut mempunyai dampak yang signifikan bagi PDI-P karena disampaikan menjelang tahun politik 2024. Dalam pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai disebut memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2024. Berdasarkan tahapan analisis yang dilakukan, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Megawati Soekarnoputri tersebut muncul, baik secara eksplisit maupun implisit melalui penggunaan kata, praktik wacana, dan sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Van Aelst, Peter, Jesper Strömbäck, Toril Aalberg, Frank Esser, Claes de Vreese, Jörg Matthes, David Hopmann, Susana Salgado, Nicolas Hubé, Agnieszka Stepińska, Stylianos Papathanassopoulos, Rosa Berganza, Guido Legnante, Carsten Reinemann, Tamir Sheaffer, and James Stanyer. 2017. "Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy?" *Annals of the International Communication Association* 41(1):3–27. doi: 10.1080/23808985.2017.1288551.
- Azhar, Anas Anang. 2017. *Pencitraan Politik Elektoral*. Vol. 5.
- Blommaert, Jan, and Chris Bulcaen. 2000. "Critical Discourse Analysis." *Annu. Rev. Anthropol.* 2000. 29:447–66.
- Coles, Gregory. 2018. "'What Do I Lack as a Woman?': The Rhetoric of Megawati Sukarnoputri." *Rhetorica - Journal of the History of Rhetoric* 36(1):58–91. doi: 10.1525/rh.2018.36.1.58.
- Fairclough, N. 2003. *Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Routledge.
- Gerald, Galang. 2019. "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1(2):134–57. doi: 10.15575/politicon.v1i2.6268.
- Keraf, Gorys. 2007. *Diksi Dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, H. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, H. 2009. *Dinamika Tutur Sapa Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Kusno, Ali. 2015. "Kekhasan Gaya Bahasa Pidato Megawati Soekarnoputri Dalam Kongres Iv Pdi Perjuangan Di Bali: Tinjauan Retorika." *Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan* 10(2):173–86.
- Lilleker, D. G. 2006. *Key Concepts in Political Communication*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd.
- Louise Ahlstrand, Jane. 2021. "Strategies of Ideological Polarisation in the Online News Media: A Social Actor Analysis of Megawati Soekarnoputri." *Discourse and Society* 32(1):64–80. doi: 10.1177/0957926520961634.
- McNair, Brian. 2003. "AN INTRODUCTION TO POLITICAL COMMUNICATION, Third Edition." *An Introduction to Political Communication, Third Edition* 1–250. doi: 10.4324/9780203699683.
- Molieono, A. M., dkk. 2017. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ren, Songsha. 2023. "Neoliberalization of Higher Education in China: A Critical Discourse Analytical Approach." *Language & Communication* 90(1):41–51. doi: 10.1016/j.langcom.2023.02.003.
- Rosidi, Rosidi. 2017. "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik." *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik* 2(1):78–100. doi: 10.55745/jpp.v2i1.15.
- Silaswati, Diana. 2019. "Analisis Wacana Kritis Dalam Pengkajian Wacana." *Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya* 12(1):1–10.
- Sulaiman, Adhi Iman. 2013. "Komunikasi Politik Dalam Demokratisasi." *Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika* 11:119–32.
- Zaman, Saefu. 2022. "Analisis Wacana Kritis Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Sawerigading* 28(2):143–56.
- Zip, Daniel. 2001. "Populist Perceptions and Perceptions of Populism in Indonesia The Case of Megawati Soekarnoputri." *South East Asia Research* 9(1):73–88.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Frista Nanda Pratiwi	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	S-1 Sastra Indonesia	Pragmatik, Wacana, Linguistik Forensik
Anis Rahmawati	Badan Riset dan Inovasi Nasional	S-2 Linguistik Terapan	Lanskap Linguistik, Linguistik Sistemik Fungsional